

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

6.1.1 Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja

1. Kinerja Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan adalah dikatakan cukup baik walaupun terjadi fluktuasi namun kinerja pertumbuhan pendapatannya positif.
2. Kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dilihat dari Analisis Derajat Desentralisasi adalah masih dikatakan rendah, dimana total persentase tertinggi berada pada tahun 2017 sebesar 18,57%, sedangkan berdasarkan standar pengukuran yang ditetapkan oleh Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991), kategori persentase derajat desentralisasi 10,01%-20,00% dikategorikan kurang. walaupun mengalami peningkatan persentase pada setiap tahunnya, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumba Barat Daya belum memberikan kontribusi kepada total pendapatan daerah.
3. Kinerja pendapatan dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya masih sangat bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat. Terlihat penurunan persentase tiap tahunnya dengan rata-rata persentase adalah 91,80%. Walaupun mengalami penurunan dan peningkatan namun ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya masih sangat tinggi

karena masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat karena sesuai dengan standar pengukuran ketergantungan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991) yang menyatakan bahwa kategori ketergantungan keuangan daerah $>50,00\%$ dikategorikan sangat tinggi.

4. Kinerja Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dilihat dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata persentasenya adalah $8,03\%$, dan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan persentase $12,09\%$, namun masih dikategorikan kurang, karena menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol (1991), persentase $10,01\%$ - $20,00\%$ dikategorikan kurang, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Kupang masih belum mampu membiayai sendiri kegiatan Pemerintahannya.
5. Kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dilihat dari rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan sangat efektif dengan rata-rata persentasenya adalah $104,54\%$
6. Kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dilihat dari analisis Pertumbuhan Belanja mengalami fluktuasi meskipun demikian pertumbuhannya tetap positif. Dengan demikian dapat dinilai bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mampu melakukan penghematan anggaran belanja.
7. Kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dilihat dari Rasio Efisiensi belanja adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan efisiensi belanja atau penghematan selama tiga tahun

anggaran tersebut, dengan persentase rasio efisiensi belanja di bawah 100%.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan adalah :

1. Analisis Kinerja Pendapatan

- 1) Pada analisis kinerja pendapatan, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya perlu meningkatkan kinerja Pendapatan terutama pada bagian pendapatan daerah khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat menjadi lebih rendah
- 2) serta sebagai solusi untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumba Barat Daya.

2. Analisis Kinerja Belanja

Pada analisis kinerja belanja, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan kinerja yang cukup baik, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pondok Edukasi, Solo.
- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Astuti, E. 2007 dalam Halim, A dan Damayanti, T. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPF, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN
- Halim, Abdul. 2002b. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andy Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Rosalina, Eka. 2008. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus di di Provinsi Sumatera Barat.Thesis S2)*. Universitas Gadjah Mada
- Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991) *Tentang Skala Kriteria Analisis Rasio Kemandirian*